



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

UNIT KERJA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HARIS DHARMA PERSADA
2. Jabatan : KEPALA SEKRETARIAT/ KOORDINATOR SEKRETARIAT
3. NHK : 893884

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.075.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 88 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 1.075.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 265.000.000

1. MOTOR, VESPA PS 150 CC Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
35.000.000
2. MOBIL, HONDA BRIO E CVT Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp.
155.000.000
3. MOBIL, SUZUKI SPLASH Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.
75.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---

D. SURAT BERTAGIH Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 124.985.715

F. HARTA LAINNYA Rp. 644.237.945

Sub Total Rp. 2.109.223.660

III. HUTANG Rp. 43.500.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.065.723.660

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.